**KONSTRUKSI JARINGAN SOSIAL PRAKTEK PROSTITUSI**

**TERSELUBUNG DI KAWASAN WISATA KOTA BATU**

**THE CONSTRUCTION OF SOCIAL NETWORK**

**OF COVERT PROSTITUTION PRACTICE**

**IN THE AREA OF BATU CITY TOURISM**

**Oman Sukmana**

Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur.

Hp. 08123200709; email: [osukmana@ymail.com](mailto:osukmana@ymail.com)

**Rupiah Sari**

Alumni Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur.

Hp. 081335140662 ; email: [rupiah\_sari47@yahoo.com](mailto:rupiah_sari47@yahoo.com)

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan akan praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Kota Batu, Malang, yang hampir sama sekali tidak terekspose keberadaanya, namun memiliki potensi dampak negatif bagi masyarakat baik secara sosial, psikologis, agama, dan budaya. Fokus penelitian ini diarahkan kepada: (1) bagaimana konstruksi jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu?; (2) bagaimanakah peran dan fungsi masing unit dalam jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive*, antara lain yakni: pramuwisata (*tourguide*), tukang ojek, petuah Desa Songgokerto, pemilik villa, warga yang berjualan di sekitar kawasan wisata, dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial praktik prostitusi terselubung terbentuk dengan melibatkan berbagai stakeholders, seperti: Pemakai (*user*), Tukang Ojek, *Tour Guide*, Pemilik Villa, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pemilik Usaha Hiburan (Karaoke dan *Billiyard*), Pihak Oknum Pemerintah, dan Masyarakat. Jaringan sosial tersebut terbentuk karena adanya ikatan kepentingan (*interest*) yang sama, terutama kepentingan ekonomi.

**Kata kunci**: Jaringan Sosial, Prostitusi Terselubung, Kawasan Wisata

**Abstract**

This research is motivated by fears the emergence of a practice prostitution in the tourist area of ​​Batu, Malang, almost entirely not exposed its existence, but has potential negative impacts on society, both socially, psychologically, religion, and culture. The focus of this research is directed to: (1) how the construction of social networks practice of prostitution in the tourist area of ​​Batu?; and (2) how the roles and functions of each unit in the social network practice of prostitution in the tourist area of ​​Batu?. This study used a qualitative approach with a qualitative descriptive research. The research location is in the tourist area Songgoriti, Batu City. The research subjects determined by purposive, among others, namely: the guide (tourguide), motorcycle taxis driver, Village leaders Songgokerto, villa owners, residents who sell around the tourist areas, and commercial sex workers (PSK). The results showed that social networks of practice veiled prostitution formed with the involvement of various stakeholders, such as: User, Motorcycle taxis driver, Tour Guide, Owner Villa, Commercial Sex Workers (PSK), Entertainment Business Owners (Karaoke and Billiyard), Person Government, and Society. The social network is formed by the bonding the same interests, especially economic interests.

**Keywords**: Social Networking, Covert Prostitution, Tourism Regions

**PENDAHULUAN**

Kota Batu, dikembangkan sebagai kawasan kota wisata utama di Jawa Timur. Dalam upaya mengembangkan Kota Batu sebagai kota wisata, pemerintah Kota Batu bekerjasama dengan berbagai investor membangun berbagai destinasi wisata buatan, seperti: Jawa Timur Park-1, Jawa Timur Park-2, *Batu Night Spectaculer* (BNS), Tempat Wisata Paralayang, Taman Predators, Musium Angkot, Musium Satwa, dan sebagainya. Selain destinasi wisata buatan, Kota Batu juga mengembangan destinasi wisata alam seperti wisata Air Terjun Coban Rondo, Air Terjun Coban Talun, Pemandian Songgoriti, Kolam Renang Selecta, Pemandian Air Panas Cangar, Wisata Gunung Panderman, dan sebagainya. Sementara untuk wisata budaya, antara lain dikembangkan kawasan Desa Wisata Bunga di Desa Sidomulyo, dan kawasan Desa Wisata Adat di Desa Punten.

Potensi alam dan budaya masyarakat Kota Batu sangat mendukung bagi pengembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata. Pengembangan kawasan kota Batu untuk pengembangan wisata, dibagi menjadi tiga wilayah pengembangan, yaitu: (1) Wilayah utara, yang dikembangkan untuk pusat wisata agribisnis, dengan wilayah pusatnya di Bumiaji; (2) Wilayah Tengah, yang dikembangkan untuk pusat pelayanan wisata, seperti hotel, penginapan, restoran, dan sebagainya., dengan wilayah pusatnya di Ngaglek dan Sisir; dan (3) Wilayah Selatan, yang dikembangkan untuk pusat wisata home industri, dengan wilayah pusatnya di Junrejo.

Kebijakan pengembangan Kota Batu sebagai kawasan kota wisata memiliki dampak positif, antara lain seperti meningktanya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dari aspek pariwisata, dimana pajak pariwisata merupakan sumber utama PAD Kota Batu, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan pengembangan Kota Batu sebagai kawasan kota wisata juga memiliki dampak negatif, antara lain yakni munculnya praktik prostitusi terselebung.

Menurut Pitana dan Gayatri (2005:3-4) pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Dengan pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi, maka pariwisata sering disebut sebagai *passport to development*, *new kind of sugar*, *tool for regional development*, *invisible export*, *non-polluting industry*, dan sebagainya. Menurut Wahab (2003: 5), pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.

Pengalaman Indonesia yang dalam kurun waktu relatif sangat singkat telah berhasil mentransformasikan posisi sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa yang sangat rendah pada awal tahun 1970-an menjadi primadona penyumbang devisa dan pertumbuhan ekonomi pada posisi papan atas memasuki awal tahun 1990-an (Spillane, 2003:3). Menurut Koentjoro (2004: 83), bank Dunia dan IMF menunjukkan peran signifikan sektor turisme sebagai sumber pendapatan devisa negara-negara berkembang. Menurut Gelgel (2006: 2) industri pariwisata Indonesia hingga pertengahan tahun 1997 berkembang dengan pesat bahkan telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan devisa negara dan pendapatan daerah. Sektor pariwisata telah mampu memberikan dampak berganda pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya di daerah-daerah tujuan wisata yang telah berkembang. Menurut Damanik, dkk., (2005:9) menyebutkan bahwa pariwisata Indonesia memiliki peluang besar menjadi media yang aplikatif dan efektif untuk menanggulanngi kemiskinan.

Namun, pariwisata juga terkait erat dengan berbagai penyakit sosial, seperti pelacuran, kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba. Mengenai keterkaitan antara kegiatan seks dengan pariwisata dikatakan bahwa seks (prostitusi) merupakan bagian integral dari pariwisata. Adalah suatu kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan salah satu motivasi orang melakukan perjalanan wisata. Bahkan sekitar 70-80 persen wisatawan dari Jepang dan negara-negara lain yang bepergian ke Asia motif seks sebagai tujuan utama perjalanan wisatanya (Pitana dan Gayatri, 2005: 126).

Beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Thailand dan Filipina, sudah menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) seks sejak akhir tahun 1970-an karena praktik prostitusi di kawasan wisata kedua negara tersebut sudah sangat terbuka. Malaysia juga sudah merupakan salah satu titik simpul dalam peta wisata seks di kawasan Asia. Sementara di Indonesia, praktik prostitusi di beberapa kawasan wisata pada umumnya masih bersifat terselubung (Spillane, 2003: 1). Fenomena praktik prostitusi merupakan fenomena sosial yang sangat menarik untuk dikaji, mulai dari praktik prostitusi resmi/lokalisasi dari pemerintah maupun prostitusi terselubung dengan kedok industri pariwisata. Kawasan prostitusi biasanya terletak pada kawasan wisata yang mendukung. Menurut Pitana dan Gayatri (2005:128) bahwa prostitusi tidak bisa dilepaskan dari fenomena kehidupan sosial masyarakat. Prostitusi juga merupakan salah satu bisnis yang selalu menyertai perkembangan sebuah destinasi pariwisata.

Meskipun prostitusi sudah berkembang di banyak negara Asia jauh sebelum berkembangnya industri pariwisata, tetapi perkembangan fenomena industri seks di kawsan ini jelas baru terjadi menyusul adopsi kebijakan pembangunan pariwisata secara besar-besaran di berbagai negara Asia sejak tahun 1960-an. Disusul mengalirnya dana bantuan internasional secara besar-besaran bagi pembangunan infrastruktur pariwisata sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh negara-negara itu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 210), kata prostitusi mengandung makna suatu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan. Secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *prostitute/prostitution* yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang. Sedangkan dalam realita saat ini, menurut kacamata orang awam, prostitusi diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki.

Menurut Bonger (dalam Kartono, 1981: 214) prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Sedangkan menurut Koentjoro (2004: 34), prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-stituere* (*pro-stauree*) yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai perjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks tanpa uang. Pelacur wanita disebut *prostitue*, sundal, balon, lonte, sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita. Menurut Bonger (dalam Mudjijono, 2005: 26) prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Sementara, Commenge (dalam Soedjono, 1977: 31) disebutkan bahwa prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki. Karena secara etimologis, kata prostitusi berarti menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan, menjual, menjajakan, namun secara umum kata proatitusi diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu. Parillo (2005: 437) menyebut bahwa *prostitution is the act of selling sexual favors for money or goods* (prostitusi sadalah tindakan menjual seks untuk tujuan mendapatkan uang atau barang-barang).

Penelitian yang mengkaji bagaimana kegiatan prostitusi di kawasan wisata antara lain dilakukan oleh Pitana, dkk. (Pitana & Gayatri, 2005: 128-129), yang meneliti prostitusi di kawasan wisata Kuta, Bali. Bisnis prostitusi di Kuta semakin marak dan berkembang yang ditandai dengan jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang jumlahnya terus berkembang. PSK di Kuta Bali dapat diklasifikasikan atas jenis kelamin, yaitu PSK wanita dan PSK laki-laki (gigolo). Khusus PSK wanita dapat dibagi ke dalam empat kelas, yakni PSK kelas atas, PSK kelas menengah atas, PSK kelas menengah bawah, dan PSK kelas bawah.

Selain dampak negatif berupa munculnya praktik prostitusi, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pariwisata telah merusak atau menghancurkan kebudayaan lokal. Pariwisata secara langsung memaksa ekspresi kebudayaan lokal untuk dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan pariwisata. Ekspresi budaya dikomodifikasi agar dapat dijual kepada wisatawan (Pitana & Gayatri, 2005: 137). Menurut Yoeti (2006: ix), dengan berkembangnya pariwisata sebagai suatu industri ternyata banyak menimbulkan permasalahan sebagai pemanfaatan seni dan budaya yang dijadikan sebagai daya tarik atraksi wisata, dimana seni dan budaya dapat saja ditawarkan kepada wisatawan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku. Muncul pro dan kontra para ahli mengenai peran turisme, namun satu hal dari peran turisme yang tidak menguntungkan bagi aktivitas ekonomi negara berkembang adalah harga mahal *cost* sosial budaya yang harus dibayar (Koentjoro, 2004: 83).

Menurut asktivitasnya, prostitusi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu prostitusi yang terdaftar atau terorganisir dan prostitusi yang tidak terdaftar (Kartono, 1981: 251). Prostitusi yang terdaftar atau terorganisir adalah jenis prostitusi yang pelakunya diawasi, pada umumnya mereka dilokalisar dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri kepada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. Sedangkan prostitusi yang tidak terdaftar, termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar (terselubung), baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu bisa di sembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib.

Munculnya praktik prostitusi di kawasan wisata, baik prostitusi terbuka maupun terselubung akan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) yang berkepentingan. Praktik prostitusi tidak berdiri sendiri akan tetapi melibatkan relasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, biasanya kepentingan ekonomi. Relasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam munculnya praktik prostitusi ini kemudian membentuk pola jaringan sosial yang saling menguntungkan.

Menurut Wasserman dan Faust (1994), sebuah jaringan sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari satu set aktor (seperti sebagai individu atau organisasi) dan satu set kompleks dari ikatan diadik antara aktor-aktor ini. Perspektif jaringan sosial menyediakan cara yang jelas tentang menganalisis struktur dari entitas sosial secara keseluruhan. Studi tentang struktur ini menggunakan analisis jaringan sosial untuk mengidentifikasi pola-pola lokal dan global, mencari entitas berpengaruh, dan memeriksa dinamika jaringan. Menurut Turner (1998: 520), analisis jaringan sebagai pendekatan teoritis sangat penting untuk memahami struktur sosial, yaitu bagaimana menggambarkan pola relasi di antara unit-unit sosial baik orang-orang, kolektifitas-kolektifitas, atau posisi-posisi. Menurut Simmel (Turner, 1998: 520) inti dari konsep tentang struktur adalah pandangan bahwa struktur terdiri dari relasi-relasi dan tautan-tautan diantara berbagai entitas.

Jejaring sosial adalah suatu [struktur sosial](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktur_sosial&action=edit&redlink=1) yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti [nilai](http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai), [visi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Visi&action=edit&redlink=1), [ide](http://id.wikipedia.org/wiki/Ide), [teman](http://id.wikipedia.org/wiki/Teman), [keturunan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keturunan&action=edit&redlink=1), dan lain-lain. Sebuah jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang terdiri dari individu (atau organisasi) disebut “simpul” (*nodes*), yang terikat (terhubung) oleh satu atau lebih tipe hubungan saling ketergantungan tertentu, seperti persahabatan, kekerabatan, kepentingan bersama, pertukaran keuangan, hubungan kepercayaan, pengetahuan dan perstise. Turner (1998: 521) menyebutkan bahwa unit dari jaringan bisa berupa orang, posisi, korporasi atau aktor-aktor kolektif, atau gambaran setiap entitas. Secara umum, unit-unit ini dikonseptualisasikan sebagai titik-titik (*points*) atau simpul-simpul (*nodes*).

Penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana konstruksi jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan kota wisata Batu, khususnya di kawasan wisata Songgoriti. Fokus penelitian ini diarahkan kepada: (1) bagaimana konstruksi jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu?; (2) bagaimanakah peran dan fungsi masing unit dalam jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu?.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif-konstruktivis (*constructivism-interpretive*) (Denzim & Lincoln, 2009:16). Menurut Denzim dan Guba (Salim, 2001:71), tujuan penelitian (*inquiry aim*) dari paradigma interpretif-konstruktivisme adalah untuk mengadakan pemahaman dan rekonstruksi *social action*. Menurut Marvasti (2004:8), tujuan dari penelitian *constructionism* adalah berkaitan dengan bagaimana variasi kultural dan situasional mewarnai sebuah realitas (*How do situationaland culturalvariations shapereality*).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln (2009:6), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Menurut Marvasti (2004;7), penelitian kualitatif memberikan penjelasan rinci dan analisis kualitas, atau substansi, dari pengalaman manusia.

Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Menurut Denzim dan Guba (Salim, 2001:89-101), studi kasus (*case study*) adalah merupakan salah satu metode dari penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus memfokuskan dirinya untuk mengetahui keumuman (*diversity*) dan kekhususan (*particularities*) dari objek studi yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Smith (Denzim & Lincoln, 2009:300), kasus adalah suatu *“system yang terbatas”*. Keunikan kasus pada umumnya berkaitan dengan: (1) ciri khas/hakikat dari kasus; (2) latar belakang historis; (3) konteks/setting fisik; (4) konteks kasus, khususnya ekonomi, politik, hukum, dan estetika; (5) kasus-kasus lain yang denganya suatu kasus dapat dikenali; dan (6) para informan atau pemberi informasi yang menjadi sumber dikenalinya kasus (Denzim & Lincoln, 2009:302; Denzim & Guba, 2001:97).

*Setting* (lokasi) penelitian ini di wilayah kota Batu, khususnya di kawasn wisata Songgoriti, Batu. Subjek dan informan penelitian ditentukan berdasarkan teknik *purposive or judgemental sampling* (Babbie, 2008:204; Neuman, 2007:142). Teknik *purposive sampling* digunakan dalam situasi di mana seorang peneliti menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan yang khusus. Menurut Neuman (2007:143), terdapat tiga kategori situasi dimana teknik *purposive or judgemental sampling* digunakan, yakni: Pertama, peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh informasi khusus dari kasus-kasus unik tertentu; Kedua, seorang peneliti dapat menggunakan *purposive sampling* untuk memilih anggota (subjek) yang sulit dijangkau atau (keadaan populasinya khusus); dan Ketiga, *purposive sampling* diugunakan ketika seorang peneliti ingin mengidentifikasikan tipe-tipe khusus dari kasus melalui investigasi mendalam (*in-depth investigation*). Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi subjek dan informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami tentang praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, yang meliputi: pramuwisata (*tourguide*), tukang ojek, petuah Desa Songgokerto, pemilik villa, warga yang berjualan di sekitar kawasan wisata, dan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dalam penelitian ini, secara garis besar proses pengumpulan data menggunakan tiga (tiga) metode pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu: (1) Wawancara mendalam (*In-deepth Interview);* (2) Observasi *(observation);* dan (4) Dokumentasi (*Documentation)*. Dalam teknik keabsahan data.peneliti memfokuskan pada criteria kredibilitas (*credibility*) dan kepastian (*confirmability*). Teknik kredibilitas (*credibility*) yang digunakan adalah: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan kecukupan referensial. Sedangkan teknik kepastian (*confirmability*) menggunakan teknik uraian rinci dan teknik audit kebenaran (Denzin & Guba, dalam Salim, 2001: 78).

Sedangkan teknik analisa data dilakukan melalui **t**ahap-tahap proses data kualitatif yang mengacu kepada pendapat Miles dan Huberman (1992: 16-21), yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Ketiga proses analisis data tersebut, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) merupakan proses simultan dan interaktif yang digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992: 20) sebagai berikut:

**Komponen-Komponen Analisis Data**

**Model Interaktif**

Sumber: Miles & Huberman, 1992: 20.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Praktik Prostitusi Terselubung di Kawasan Wisata Songgoriti, Kota Batu:**

Kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, Malang, selain terkenal sebagai daerah wisata pemandian air panas juga terkenal dengan keberadaan villan-nya. Namun villa yang dimaksud disini lebih kepada rumah sewa yang menyewakan kamar-kamarnya untuk tempat penginapan. Meski memang ada beberapa yang berupa villa secara asli namun lebih banyak yang berupa rumah sewa. Keberadaan villa di kawasan Songgoriti awal mulanya tercipta karena pengaruh adanya Hotel Songgoriti yang telah lama menjadi ikon daerah tersebut.

Tarif yang diberikan untuk penyewaan villa juga beragam. Rsd (35 tahun) salah satu pemilik villa menyatakan bahwa untuk tarif sewa kamar berkisar mulai dari Rp 50 Ribu untuk waktu kurang dari 6 jam, dan untuk sewa satu hari sekitar Rp 75 Ribu. Namun harga tersebut berbeda dengan sewa satu rumah secara utuh. Seperti yang dinyatakan oleh bapak TP selaku Ketua Paguyuban “Villa Supo”, bahwa untuk rumah dengan tiga kamar tarif sewanya bisa Rp 300 Ribu dan untuk yang 4 kamar biasanya disewakan sekitar Rp 400 Ribu per-malamnya. Akan tetapi harga tersebut bisa naik sampai dua kali lipat untuk hari Sabtu dan Minggu, bahkan jika hari libur nasional harga sewanya bisa naik menjadi 15-20 kali lipat.

Fasilitas yang diberikan villa kepada para pengunjungnya pun termasuk dalam taraf yang baik untuk sebuah penginapan. Ada tiga klasifikasi yang membedakan villa-villa tersebut, yakni: (1) Klasifikasi A yang letaknya berada di pinggir jalan yang memiliki fasilitas 3-5 kamar yang dilengkapi *bath-up* dan *showe*r; (2) Klasifikasi B yang lokasinya masuk gang dengan fasilitas 2-3 kamar yang dilengkapi kamar mandi dalam walaupun masih sederhana; dan (3) Klasifikasi C berada di daerah pojok-pojok kampung dengan fasilitas yang sederhana.

Wilayah Songgoriti memang merupakan kawasan wisata yang sangat indah. Letaknya berada di daerah lereng pegunungan, udaranya sejuk dengan pepohonan rindang yang menyelimutinya. Ditambah lagi dengan keberadaan pemandian air panas dan villa-villa yang berjejeran untuk tempat penginapan. Namun ironisnya, banyak kalangan yang kemudian menyalahgunakan keberadaan villa-villa tersebut. Para tamu yang menginap di villa banyak yang bertujuan untuk menyewa Pekerja Seks Komersial (PSK), atau mereka yang merupakan pasangan kekasih yang hanya ingin melepaskan hasrat seksual mereka. Dalam hal ini berarti keberadaan villa menunjang adanya seks bebas, baik di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pasangan selingkuh yang tidak memiliki ikatan pernikahan, dan sebagainya.

Para tamu (lelaki hidung belang) yang menginap di villa kawasan Songgoriti dapat memesan Pekerja Seks Komersial (PSK) sesuai dengan yang diinginkan, yang dilayani selama 24 jam. Usia PSK yang dapat dipesan (dibooking) disesuaikan dengan jam pemesanan. Untuk PSK yang berstatus pelajar SMA/SMP dapat dipesan pada jam 16.00-22.00 wib, sedangkan untuk PSK yang berstatus mahasiswa dapat dipesan pada jam 20.00-23.00 wib, sementara untuk PSK usia diatas 25 tahun dapat dipesan pada jam 23.00-07.00 wib. Seperti yang diungkapkan salah satu pemilik villa Rh (27 tahun), sebagai berikut:

“Kalo disini jamnya sudah ditentukan, jadi tertata rapi, mulai dari SMP-SMA jam 16.00 – 20.00 wib, mahasiswa mulai jam 20.00-23.00 wib, berumur diatas 25 tahun jam 23.00 – 07.00 wib”.

Para lelaki hidung belang yang berkeinginan menyewa para pemuas seks ini harus mengikuti aturan main yang telah ditentukan oleh si penjual, dengan catatan harus setuju dengan kesepakatan yang disampaikan sebelum memakai jasa pemuas seks tersebut. Mereka dapat menyewa Pekerja Seks Komersial (PSK) tanpa harus ada rasa takut akan keamanan ataupun adanya razia dari pihak pemerintah. Tarif PSK berkisar mulai dari Rp 250 Ribu untuk waktu satu jam (*short time*), dan sebesar Rp 1,5 Juta untuk satu malam (*long time*). Para Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan Songgorti jumlahnya sekitar 85 orang seperti yang diungkap oleh Cp (19 Tahun), yaitu :

“Di sini gak terlalu banyak mbak, cuma ada di dua tenpat, itupun dibagi 2 jumlahnya,. Separuh-separuh jadi sama rata. Asalnya juga berbeda-beda rata-rata masih wilayah Jawa Timur. Dari 85 orang, 12 orang asli Batu tapi gak ada yang tinggal disini mbak.”.(Hasil wawancarahari hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pukul 16:00 WIB)

Penuturan Cp tersebut menggambarkan bahwasannya manajemen prostitusi di kawasan Songgoriti ini telah tersusun sedemikian rupa sehingga tidak terlihat dengan menonjol, masyarakat luar tidak akan tahu apabila masyarakat tidak memperhatikan dan mengamati kawasan ini dengan seksama.

Ada tiga kesempatan pemesan untuk mengganti Pekerja Seks Komersial (PSK), apabila pilihan pertama tidak cocok maka si pemesan hanya membayar uang *tourguide* (ojek) sebesar Rp 25 ribu, kesempatan kedua sama dengan kesemptan pertama, sedangkan pada kesempatan ketiga apabila pemesan masih belum sesuai, pemesan harus membayar ojek serta separuh tarif dari harga Pekerja Seks Komersial (PSK) per-sekali main (*short time*). Pekerja Seks Komersial (PSK) sangat dirahasiakan identitasnya dan tidak diperkenankan memberikan nomor *contact person* yang ia milki kepada pelanggan yang di layaninya.

Alur relasi (transaksi) dalam praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, terjadi melalui dua alur, yakni alur 1 yang terjadi antara pemakai (*user*) dengan pemilik villa; dan alur 2 yang terjadi antara pemakai (*user*) dengan tukang ojek (*tourguide*). Jadi para pemakai (*user*) jasa PSK dapat melakukan transaksi melalui pihak pemilik villa atau melalui pihak tukang ojek (*tourguide*), sebagaimana digambarkan dalam bagan 1 berikut ini:

**Bagan 1:**

**Alur Relasi dalam Jaringan Sosial Praktik Prostitusi Terselubung**

**di Kawasan Wisata Songgoriti, Kota Batu.**

Pemakai (User)

Pemilik Villa

Tukang Ojek *(Tourguide****)***

Tempat Karoke

& *Billiyard*

Ojek *(Tourguide)*

PSK

Pemilik Villa

PSK

Pemakai (User)

Ojek *(Tourguide)*

Sumber: Hasil Penelitian

102

Keterangan:

Alur 1

Alur 2

**Konstruksi Jaringan Sosial Praktik Prostitusi Terselubung di Kawasan Wisata Songgoriti, kota Batu:**

Jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, melibatkan berbagai *stake-holder*, yakni: Oknum pemerintah, paguyuban Villa Supo, pemakai (*user*), warga pemilik villa, tukang ojek (*tour-guide*), pemilik tempat Karaoke dan *Bilyard*, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan masyarakat setempat. Para stakeholder tersebut membuat suatu rantai jaringan yang saling mendukung dan saling menguntungkan, khususnya secara ekonomis. Lingkaran jaringan sosial antar-stakeholder dapat digambarkan dalam bagan 2 berikut ini:

**Bagan 2;**

**Stakeholder Jaringan Sosial Prostitusi Terselubung di Kawasan Wisata Songgoriti, Kota Batu**

**Oknum Pemerintah**

**Masyarakat Setempat**

**Paguyuban Villa Supo**

**PSK**

**Pemakai (User)**

**Pemilik Karaoke & Bilyard**

**Pemilik** Villa

**Tour Guide (Tukang Ojek)**

Selanjutnya, munculnya fenomena praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, melibatkan pola relasi dan interaksi antar *stake-holder* dalam jaringan sosial yang saling mendukung dan menguntungkan. Pola relasi dan interaksi antar *stake-holder* dalam praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu ini sudah terjalin dengan rapi. Pola relasi/interaksi tersebut sebagaimana digambarkan dalam bagan 3 berikut ini:

**Bagan 3:**

**Pola Interaksi Jaringan Sosial Praktik Prostitusi Terselubung**

**di Kawasan Wisata Songgoriti, Kota Batu**

**OKNUM PEMERINTAH**

**PemilikVilla**

**Paguyuban**

**Villa**

**Tukang Ojek**

Keterangan:

Interaksi searah

Interaksi dua arah

117

Sedangkan fungsi masing-masing *stake-holder* dalam simpul jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1:**

**Fungsi Masing-Masing Simpul Jaringan**

**Sosial Praktik Prostitusi Terselubung**

**di Kawasan Wisata Songgoriti, Kota Batu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Simpul Jaringan** | **Fungsi** |
| 1. | Oknum pemerintah | * Sebagai pelindung pengamanan bisnis prostitusi terselebung. * Termasuk pengguna jasa prostitusi |
| 2. | Pemakai *(User)* | * Pihak yang menentukan berapa pemakaian PSK * Pihak yang menjadi pemeran utama dalam alur praktik prostitusi terselubung. * Menjadi konsumer villa dan PSK * Secara tidak langsung bisa menjadi sebagai media informasi kepada konsumer lainnya, mengenai adanya prostitusi di Songgoriti. |
| 3. | Pemilik Villa | * Memberi tahukan aturan pemakain Villa * Memberikan informasi aturan pemakain dan harga PSK * Memberikan Alat kontrasepsi apabila pemakai (user) tidak membawa tetapi dengan membayar perkotak * Sebagai penyalur antara Ojek (Tourguide) dengan PSK * Sebagai penyalur antara Pemakai (user) dengan PSK * Menentukan tarif pemakaian jasa prostitusi |
| 4. | Ojek (*Tourguide*) | * Sebagai penawar *(marketing)* lokasi villa dan PSK * Menjemput dan mengantar PSK yang akan di pakai * Sebagai pihak yang memberkan informasi tentang villa dan PSK * Sebagai penyalur pemakai *(User)* dengan pemilik villa. |
| 5. | PSK | * Menentukan jam pemakain jasanya * Melayani Pemakai *(User)* * Memberikan tips kepada ojek *(tourguide)* sebesar 10% dari tarif sekali main. |
| 6. | Paguyuban Villa “Supo” | * Sebagai komunitas yang mewadahi, penghubung para pemilik Villa ke pemerintah dalam bentuk perizinan usaha. * Sebagai payung hukum yang membawahi keseluruhan pihak yang terlibat * Menjaga, mengatur dan menjamin keamanan Villa Songgoriti |

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian data hasil penelitian, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama; Jaringan Sosial yang terbentuk dalam praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti merupakan faktor yang mempertahankan dan memperkuat praktik prostitusi di kawasan wisata tersebut. Jaringan sosial yang terjalin antara pihak satu sama lain akan memudahkan dalam pengelolaan, mempertahankan, dan menutupi praktik prostitusi terselubung tersebut. Jaringan Sosial dalam praktik prostitusi terselubung di kawasan Songgoriti melibatkan berbagai pihak, yakni: Pemakai *(user),* ojek *(tourguide),* pemilik villa, Pekerja Seks Komersial (PSK), pemilik usaha karoke dan *billiyard,* Oknum Pemerintah, masyarakat Songgoriti. Stakeholder-stakeholder tersebut terbentuk karena berdasarkan jaringan kepentingan *(interest)* yang sama, khususnya kepentingan ekonomi (bisnis).

Kedua; Fungsi dan peran masing-masing pihak dalam Jaringan Sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti meliputi: (1) Tukang Ojek *(tourguide)* berfungsi sebagai penyalur pemakai *(user)* dan menjemput serta mengantar Pekerja Seks Komersial (PSK) bekerja; (2) Pemilik Villa berfungsi sebagai penyedia tempat untuk melakukan kegiatan praktik prostitsi; (3) Pekerja Seks Komersial (PSK) befungsi sebagai pelayan serta sebagai daya tarik pemakai *(user);* (4) Tempat Karaoke (Billiyard)berfungsisebagai tempat penampung PSK sebelum di sewa oleh pemaka *(user)*; dan (5) Pemakai *(user)* berfungsi sebagai konsumer yang menggunakan jasa prostitusi dan penyewa villa.

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat memberikan saran-saran untuk beberapa instansi adalah sebagai berikut:

**Pertama**; Bagi Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Batu, agarlebih memperhatikan kenyamanan industri pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang secara tegas melarang penggunaan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, termasuk penyediaan fasilitas villa yang mendukung munculnya praktik prostitusi terselubung;

**Kedua**; Bagi Dinas Sosial Kota Batu agar proaktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat kawasan Songgoriti dan para Pekerja Seks Komersial (PSK) tentang dampak negatif praktik prostitusi bagi kehidupan sosial; dan

**Ketiga**; Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Songgoriti, khususnya para pemilik villa, agar selektif dalam memilih tamu yang ingin menginap, serta tidak memberikan peluang munculnya praktik prostitusi.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Babbie, Earl. (2008). *The Basics of Social Research*. Belmont, USA: Thomson Wadsworth.

Damanik, Janianti; Kusworo, Hendrie Adji; & Raharjana, Destha T (Peny.). (2005). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata. Yogyakarta: Kepel Press.

Denzin, Norman K.; & Lincoln, Yvonna S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gelgel, I Putu. (2006). Industri Pariwisata Indonesia: Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO), Implikasi Hukum dan Antisipasinya. Bandung: ADITAMA.

Kartono, Kartini. (1981). Patologi Sosial.Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Koentjoro. (2004). *On The Spot*:Tutur Dari Seorang Pelacur. Yogyakarta: Qalam.

Marvasti, Amir B. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: SAGE Publications.

Miles, Matthew B.; & Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Neuman, W. Lawrence. 2007. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Appoaches*. Boston: Pearson Education, Inc.

Parrillo, Vincent N. (2005). *Comtemporary Social Problems*. Boston: Pearson.

Pendit, Nyoman S. (2006). Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita.

Pitana, I Gd., & Gayatri, Putu G. (2005). Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: ANDI.

Salim, Agus (peny.). (2001). Teori dan Paradigma Penelitan Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan penerapannya. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Soedjono, D. (1997). Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat. Bandung: Karya Nusantara.

Spillane, James J. (ed.). (2003). Wisata Seks dalam Industri Pariwisata Peluang atau Ancaman?.Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Turner, Jonathan H. 1998. *The Struktur of Sociological Theory*. Sixth Edition. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Wahab, Salah. (2003). Manajemen Kepariwisataan. Jakarta: Pradnya Paramita.

Wasserman, Stanley; & Faust, Katherine. 1994. "Social Network Analysis in the Social and Behavioral Sciences". *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press. pp. 1–27. [ISBN](http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number) [9780521387071](http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780521387071).

Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.

Yoeti, Oka A. (2006). Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya. Jakarta: Pradnya Paramita.